



# BULETIN

## EDISI MARET 2021

### KATA REDAKSI

Pada Edisi Kedua kali ini Buletin Bulanan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) hadir kembali untuk memberikan informasi pilihan dari kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan DJPI.

Bulan ini ada beberapa kegiatan menarik, antara lain mengenai Pekan Jafung DJPI yang diselenggarakan selama lima hari, kemudian adanya Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2020 yang diikuti oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan DJPI diharapkan dapat mempercepat dalam menyiapkan segala kebutuhan hukum yang menunjang pekerjaan di bidang pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan.

Selanjutnya pada edisi kali ini juga terdapat informasi mengenai audiensi Direktur PPISDA dengan Gubernur Banten dalam rangka membahas integrasi Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat, selain itu juga terdapat informasi mengenai sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan DJPI bersama Bank BNI mengenai KPR Sejahtera FLPP dan KPR BP2BT serta kunjungan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan ke lokasi proyek Jalan Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Semoga sajian informasi yang kami berikan dapat membantu dalam memperbarui informasi bagi para pembaca setia buletin DJPI, selamat membaca.

### DAFTAR ISI

PEJABAT DAN PEGAWAI DJPI IKUTI SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020 ...	1
DJPI ADAKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI BERSAMA BANK BNI .....	1
DIRJEN PI KUNJUNGI LOKASI RENCANA PROYEK JALAN TOL GEDE BAGE-TASIKMALAYA- CILACAP DAN JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN .....	2
PEKAN JABATAN FUNGSIONAL DJPI .....	2
DIREKTUR PPISDA BERSAMA GUBERNUR BANTEN BAHAS INTERGRASI PROYEK KPBU SPAB DAN SPAM KARIAN BARAT .....	3



## PEJABAT DAN PEGAWAI DJPI IKUTI SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 24 TAHUN 2020

**D**irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan melaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum pada hari Kamis (4/3), bertempat di Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan penjelasan terkait tata cara, aturan baku dan penyusunan sekaligus evaluasi produk hukum di lingkungan internal DJPI, dengan menghadirkan narasumber Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum Kementerian PUPR, Mardi Parnowiyoto. Hadir dalam acara tersebut Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan DJPI.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto yang hadir dalam acara tersebut melalui zoom menyampaikan dalam sambutannya bahwa dalam melaksanakan pembentukan produk hukum di Kementerian PUPR perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar.



“Untuk itu sudah barang tentu kita sebagai penggerak dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan harus memahami secara keseluruhan Peraturan Menteri tersebut agar pelaksana di unit kerja benar-benar memahami mekanismenya sehingga akan lebih melancarkan proses penyusunannya nanti” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Ir. Irma Yani, MT yang berharap kedepannya setelah mengetahui koridor-koridor hukum dalam Peraturan Menteri ini, dapat mempercepat dalam penyiapan segala kebutuhan produk hukum guna menunjang pekerjaan di bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. (SV/Fen)

## DJPI ADAKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI BERSAMA BANK BNI

**D**irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP) mengadakan Sosialisasi dan Edukasi Bersama Program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan KPR BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), yang dilanjutkan dengan kunjungan lokasi ke beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 4 - 9 Maret 2021. Acara ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai program KPR bersubsidi dan kunjungan lapangan untuk melihat fisik unit rumah yang akan dibiayai oleh fasilitas KPR Sejahtera FLPP, KPR BP2BT melalui Bank BNI.

Dalam kesempatan tersebut Kasubdit Kemudahan dan Bantuan, Dit.PPP DJPI menyampaikan bahwa Kementerian PUPR menegaskan tidak ada relaksasi terhadap kualitas bangunan rumah bersubsidi, karena kualitas bangunan merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat dengan memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan terhadap struktur bangunan rumah bersubsidi dilakukan oleh pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi yang direkrut oleh pengembang pada

proyek perumahan sejak dilakukannya proses pembangunan. Selain itu sesuai dengan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) luas maksimal tanah untuk rumah bersubsidi adalah 200 m2 dengan batasan lebar kaveling paling rendah enam meter.

Selain itu disampaikan pula bahwa pada Tahun 2020 rata-rata proses pencairan dana BP2BT adalah 7 (tujuh) hari, dengan catatan apabila dokumen persyaratan yang dikirim oleh bank atau pengembang sudah lengkap dan benar kepada pihak satker. Untuk itu, diharapkan bank maupun pengembang dapat melengkapi dokumen persyaratannya sebelum dilakukan pengajuan permohonan.

Dalam kesempatan yang sama pihak Bank BNI menyampaikan bahwa Bank BNI akan merestrukturisasi kredit para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak Covid-19 dengan menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi kredit sesuai kondisi dan kemampuan nasabah mitra usaha BNI dengan prinsip kehati-hatian.

Rangkaian acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa lokasi perumahan di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain Perumahan Karang Kencana, Perumahan Griya Sartika dan Perumahan Bela Negara Tugu Regency yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian kunjungan lokasi dilanjutkan esok harinya ke Perumahan Mutiara Wilis, Tegal dan Perumahan Ndalem Asri, Solo, Jawa Tengah.

Hadir dalam acara tersebut Perwakilan dari PPDPP, Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Pengembang, BNI Bandung, BNI Semarang, BNI Jogjakarta dan asosiasi pengembang. (Fen)





## DIRJEN PI KUNJUNGI LOKASI RENCANA PROYEK JALAN TOL GEDE BAGE- TASIKMALAYA- CILACAP DAN JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN

Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dan Lokasi konstruksi Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan. Minggu (14/3).

Tujuan dari pelaksanaan kunjungan lapangan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait progress, isu dan permasalahan penguasaan jalan tol yang sedang dikerjakan.

Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap ini merupakan proyek KPBU *unsolicited* yang direncanakan memiliki panjang 206,65 Km dan saat ini sedang dalam tahap pelelangan, untuk penetapan pemenang lelang rencananya akan diumumkan pada bulan Juli 2021.

Sedangkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 61,715 km dengan BUJT PT Citra Karya Jabar Tol saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Jalan Tol ini terbagi menjadi enam Seksi, dengan Seksi 1 dan 2 merupakan bagian dukungan Pemerintah. Konstruksi Seksi 1 dan 2 diharapkan dapat selesai pada bulan Desember 2021 sehingga dapat beroperasi bersama dengan Seksi 3 yang saat ini sudah terbangun 100 persen. Sedangkan untuk Seksi 4, 5, dan 6 diharapkan dapat selesai pada Q1 Tahun 2023.

Dalam kunjungan lapangan tersebut hadir Perwakilan dari Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisandawu, Perwakilan dari Konsorsium Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Perwakilan dari PT. Citra Karya Jabar Tol dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. (RA/Fen)

**D**irektur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto bersama dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini berkunjung ke Lokasi Rencana



## PEKAN JABATAN FUNGSIONAL DJPI

**D**irektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan kegiatan Acara Pekan Jabatan Fungsional DJPI, bertempat di Atrium Lantai 2 DJPI, Senin (15/3). Acara yang berlangsung selama lima hari ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada para Pejabat Fungsional terkait profesi inti yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Ir. Irma Yanti, MT yang hadir mewakili Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam sambutannya mengatakan bahwa arah kebijakan Manajemen PNS saat ini maupun ke depan menekankan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Termasuk di dalamnya yaitu pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai dengan perbandingan objektif antara kualifikasi, kompetensi dan persyaratan yang dimiliki oleh PNS.

"Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, jadi bersifat lebih mandiri, hasil kerjanya dapat dipatenkan menjadi karya nyata individual, bekerja berdasarkan langkah kerja yang jelas dan terarah, tugas pokok didasari oleh kemampuan berfikir serta landasan keilmuan dan keterampilan tertentu" jelasnya.

Dengan demikian, menurutnya posisi dan peran dari JF sangat strategis sebagai kelompok jabatan yang berfungsi melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah yaitu pelayanan masyarakat, melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut Sesditjen DJPI berharap para narasumber dari Kementerian PUPR dapat membantu menyelesaikan permasalahan kebijakan dan teknis terkait kebijakan pembinaan dan pengembangan JF. Sedangkan untuk para peserta dapat mengikuti acaranya dengan seksama sehingga dapat mendiskusikan secara langsung segala permasalahan yang dihadapi kepada Narasumber.

Hadir dalam acara tersebut Para Pejabat Administrator dan Pengawas serta Para Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI. (Fen/Kom)



## DIREKTUR PPISDA BERSAMA GUBERNUR BANTEN BAHAS INTERGRASI PROYEK KPB SPAB DAN SPAM KARIAN BARAT

**D**irektur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Arvi Argyantoro melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim guna membahas Integrasi Proyek KPB SPAB dan SPAM Karian Barat pada hari Senin (21/3) bertempat di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten.

Pada audiensi tersebut, Direktur PPISDA mengungkapkan kapasitas air baku Waduk Karian melalui saluran terowongan Ciuyah nantinya mencapai 12,4 m<sup>3</sup> per detik. Sementara suplai Waduk Karian ke Bendung Pamarayan mencapai 2,2 m<sup>3</sup>/dtk. SPAB Karian Barat juga akan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara layanan eksisting dan kebutuhan air baku di tahun 2025.

Gubernur Banten menyambut baik rencana proyek tersebut dan menyampaikan bahwa pemanfaatan pembangunan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula harus berpihak kepada masyarakat atau rakyat.

Pemanfaatan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula adalah untuk air irigasi pertanian, air baku, air minum dan industri. Untuk itu pihaknya memerlukan kejelasan mengenai kewenangan Provinsi Banten dalam pengelolaan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula, serta apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten dalam pengelolaannya.

"Secara teknis kita perdalam agar lebih kongkrit pola kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha", ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Asisten II Setda Provinsi Banten M Yusuf, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, M Trenggono, serta unsur BPKAD Provinsi Banten, Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi Dit. PPISDA Acep Atmaja, Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi Dit. PPIP Annisa Dian Pratiwi, dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3). (Ind/Kom)

### PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP

### PENASEHAT

Ir. Irma Yanti, MT

### PENGARAH

- Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- Ir. Arvi Argyantoro, MA
- Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM
- R. Haryo Bakti Martoyoedo, ST, M.Sc

### PEMIMPIN REDAKSI

- Dedy S. Budisusetyo, SH, MT

### REDAKTUR PELAKSANA

- Fenty Meilisa Syafril, S.Sos, M.Si

### REDAKSI

- Shara Vadya, S.I. Kom

### EDITOR

- Anggoro Widyastika, SH, MH
- Putrawan, SH

### DESAINER

- Fahmi Nurhuda S.Ds
- Michael Adha

### FOTOGRAFER

- Dwi Cristianto

### REPORTER

- Komarudin

### SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE. MSi
- Yudhistira Adi Nugroho, SH

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK,  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
JL. RADEN PATAH 1 NO. 1 KEBAYORAN BARU  
JAKARTA SELATAN 12110  
TELEPON/FAX: (021) 7200793

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.  
Hak Cipta dilindungi undang-undang.